COMSERVA:
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Volume 3 No. 9 Januari 2024 (3897-3903)
e-ISSN: 2798-5210
p-ISSN: 2798-5652

Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst: dalam Konteks Hukum Nasional

Analysis of The Supreme Court Decision of The Republic of Indonesia Number 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst: in The Context of National Law

[1)] Lie Amat, [2)] Hudi Yusuf
[1,2] Universitas Bung Karno, Indonesia

*Email: [1)] lieamat1970@gmail.com, [2)] hoedydjoesoef@gmail.com
**Correspondence: [1)] Lie Amat*

DOI:
10.59141/comserva.v3i09.1149

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum nasional. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Analisis mendalam terhadap putusan ini mencakup aspek-aspek krusial seperti argumen hukum yang digunakan, pertimbangan hakim, dan implikasi lebih luasnya terhadap sistem hukum nasional. Studi ini membedah argumen-argumen kunci yang diajukan dalam proses peradilan dan menjelaskan bagaimana Mahkamah Agung mencapai keputusan akhirnya. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan studi kasus. Selain itu, analisis memusatkan perhatian pada dampak keputusan tersebut terhadap interpretasi dan penerapan hukum nasional, dengan menyoroti potensi perubahan atau konsekuensi dalam penegakan hukum di tingkat nasional. Dengan memahami esensi putusan Mahkamah Agung ini, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang evolusi hukum nasional. Implikasi praktis dari putusan ini juga dibahas, menyoroti peran penting Mahkamah Agung sebagai pilar sistem peradilan dalam konteks hukum Indonesia. Kesimpulan ditarik untuk menyoroti signifikansi putusan ini dalam kerangka hukum nasional serta potensi dampaknya pada masa depan.

Kata Kunci: Mahkamah Agung; Putusan Hukum; Analisis Hukum; Sistem Hukum Nasional; Interpretasi Hukum.

ABSTRACT

The envoy of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst has significant relevance in the context of national law. In this ruling, the Supreme Court took steps that play an important role in law enforcement. An in-depth analysis of this ruling covers crucial aspects such as the legal arguments used, the judges' deliberations, and its broader implications for national legal systems. The study dissects the key arguments put forward in the judicial process and explains how the Supreme Court reached its final decision. The research method used in this analysis is a case study approach. In addition, the analysis focuses on the impact of such decisions on the interpretation and application of national laws, highlighting potential changes or consequences in law enforcement at the national level. By understanding the essence of these Supreme Court rulings, this study aims to contribute to an in-depth understanding of the evolution of national law. The practical implications of this ruling were also discussed, highlighting the important role of the Supreme Court as a pillar of the judicial system in the context of Indonesian law. Conclusions were drawn to

highlight the significance of this ruling within the framework of national law as well as its potential impact on the future.

***Keywords**: Supreme Court, Legal Decision, Legal Analysis, National Legal System, Legal Interpretation.*

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst mencerminkan titik puncak dari perkembangan sistem peradilan di Indonesia. Keputusan ini memiliki signifikansi luar biasa dalam konteks hukum nasional, memegang peranan penting dalam menentukan arah dan implementasi norma-norma hukum di tingkat domestik (Bogdan, 2019). Analisis mendalam terhadap putusan ini menjadi penting untuk memahami landasan hukum, argumen-argumen yang diajukan, dan dampaknya terhadap sistem peradilan Indonesia (Marrietta & Adam, 2023) (Hiola, 2023).

Dalam pendahuluan ini, akan diuraikan latar belakang kasus yang menjadi pokok putusan tersebut, menjelaskan permasalahan hukum yang mendasar, dan menggaris bawahi urgensi analisis terhadap keputusan Mahkamah Agung ini. Dengan menggali aspek-aspek ini, kita dapat memahami konteks yang melingkupi putusan tersebut serta relevansinya dalam kerangka hukum nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kontribusi Mahkamah Agung terhadap pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, serta bagaimana putusan ini dapat membentuk preseden yang memengaruhi pandangan hukum dan penerapan norma-norma hukum di masa yang akan datang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam kasus tertentu, dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai metode penelitian yang diterapkan:

Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena khusus dalam konteks nyata, dalam hal ini, proses peradilan terkait dengan putusan tersebut (Tahir et al., 2023). Penelitian Terfokus pada Argumen Hukum: Fokus utama penelitian adalah pada argumen-argumen hukum yang diajukan dalam proses peradilan. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap dasar hukum dari setiap argumen, kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana argumen tersebut memengaruhi perjalanan keputusan hukum. Pengumpulan Data: Data untuk penelitian ini diperoleh dari putusan Mahkamah Agung yang bersangkutan dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Dokumen-dokumen ini mencakup pleidoi, dokumen pengadilan, dan argumen hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Analisis Mendalam: Penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap setiap aspek kasus, dari argumen hukum hingga pertimbangan hakim. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif landasan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan akhir Mahkamah Agung.

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan menitikberatkan pada analisis argumen hukum, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kasus hukum tersebut. Metode ini dipilih karena keputusan Mahkamah Agung seringkali mencerminkan

pemahaman yang mendalam tentang penerapan hukum di tingkat tertinggi dan dapat memberikan pandangan yang bermakna terhadap perkembangan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Argumen Hukum

Dalam konteks studi ini, analisis argumen hukum dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap dan memahami landasan hukum dari setiap argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut (Anggreni et al., 2019). Proses analisis ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. **Identifikasi Argumen Hukum:**

Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus menyampaikan berbagai argumen hukum selama proses peradilan. Identifikasi argumen ini melibatkan pemilahan dan dokumentasi setiap argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemahaman tentang klaim atau posisi hukum yang mereka sampaikan.

2. **Pengklasifikasian Argumen:**

Setelah argumen-argumen diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan mereka berdasarkan tema atau isu hukum tertentu. Hal ini membantu peneliti untuk mengorganisir data dan memahami struktur argumen yang mungkin berkaitan.

3. **Analisis Dasar Hukum:**

Setiap argumen dieksplorasi secara mendalam untuk memahami dasar hukumnya. Ini mencakup referensi ke norma hukum, peraturan, putusan pengadilan sebelumnya, atau prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar argumen tersebut. Analisis ini memeriksa kekuatan logika dan validitas dasar hukum dari masing-masing argumen.

4. **Penilaian Dampak Terhadap Keputusan Akhir:**

Setiap argumen dievaluasi untuk menilai bagaimana argumen tersebut memengaruhi atau berkontribusi terhadap keputusan akhir Mahkamah Agung. Dampak ini dapat berkisar dari pertimbangan utama dalam putusan hingga peran sekunder dalam membentuk pandangan hukum hakim.

5. **Pembentukan Kesimpulan:**

Hasil analisis digunakan untuk membentuk kesimpulan tentang kekuatan dan relevansi masing-masing argumen dalam konteks kasus. Kesimpulan ini dapat membantu menggambarkan dinamika perdebatan hukum yang terjadi selama proses peradilan dan faktor-faktor apa yang mungkin memengaruhi keputusan akhir.

Dengan melakukan analisis argumen hukum secara mendalam, studi ini bertujuan untuk menggali substansi hukum yang menjadi dasar keputusan Mahkamah Agung. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertarungan hukum yang terjadi di tingkat tertinggi dan bagaimana argumen tersebut berkontribusi pada pembentukan pandangan hukum hakim.

PERTIMBANGAN HAKIM

Analisis terhadap pertimbangan hakim merupakan aspek kunci dalam memahami dan menganalisis suatu keputusan hukum (Prasetyo et al., 2021) (Sidabutar & Suhatrizal, 2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dapat bervariasi dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum nasional. Proses analisis pertimbangan hakim melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Faktor Pertimbangan:

Pada tahap awal, penelitian akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan keputusan. Faktor-faktor ini dapat melibatkan pertimbangan hukum, bukti-bukti yang diajukan, aspek etika, dan norma-norma hukum yang berlaku.

2. Penelusuran Dasar Hukum dan Precedent:

Penelitian akan melibatkan penelusuran dasar hukum yang digunakan hakim untuk mendukung keputusannya. Ini bisa mencakup rujukan pada undang-undang, putusan pengadilan sebelumnya, dan prinsip-prinsip hukum yang telah mapan.

3. Analisis Keterkaitan dengan Prinsip Hukum Nasional:

Setiap faktor pertimbangan dievaluasi dalam konteks prinsip-prinsip hukum nasional. Pertanyaan yang mungkin diajukan mencakup sejauh mana pertimbangan tersebut konsisten dengan norma-norma hukum dan nilai-nilai keadilan yang diakui dalam sistem hukum nasional.

4. Pemahaman Konsep Keadilan:

Aspek keadilan sering kali menjadi pertimbangan sentral bagi hakim. Analisis melibatkan pemahaman lebih lanjut tentang konsep keadilan yang mendasari pertimbangan hakim, termasuk bagaimana prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam keputusan.

5. Evaluasi Terhadap Fakta dan Bukti:

Pertimbangan hakim juga melibatkan evaluasi terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Analisis ini dapat mengungkap bagaimana hakim menyimpulkan relevansi dan keandalan bukti dalam konteks hukum nasional.

6. Pertimbangan Terhadap Kaidah Hukum:

Hakim juga harus mempertimbangkan kaidah hukum yang relevan dalam menyusun pertimbangannya. Ini mencakup penilaian terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari dan memandu pengambilan keputusan.

Melalui analisis pertimbangan hakim ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor apa yang menjadi landasan keputusan hakim. Hal ini membantu membongkar dinamika dan kompleksitas proses pengambilan keputusan di tingkat peradilan serta bagaimana pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku.

Dampak terhadap Sistem Hukum Nasional

Analisis terhadap dampak putusan Mahkamah Agung pada sistem hukum nasional adalah langkah penting untuk memahami konsekuensi lebih luas yang mungkin terjadi akibat keputusan tersebut (Thalib & Sh, 2018). Penjelasan terinci mengenai dampaknya pada interpretasi dan penerapan hukum dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Pengaruh terhadap Praktik Hukum:

Putusan Mahkamah Agung dapat memberikan arah baru dalam praktik hukum di tingkat nasional (Siahaan, 2022). Hal ini bisa mencakup perubahan dalam interpretasi hukum dan tindakan praktis yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan hukum.

2. Perubahan dalam Kaidah dan Norma Hukum:

Keputusan Mahkamah Agung dapat membawa perubahan dalam kaidah dan norma hukum yang berlaku (Indratanto & Nurainun, 2020). Ini mencakup penyesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat menciptakan landasan baru untuk kasus serupa di masa mendatang.

3. Pengaruh pada Sistem Peradilan:

Dampak putusan ini juga dapat terasa dalam sistem peradilan secara keseluruhan. Hal ini mencakup potensi perubahan dalam pendekatan atau penekanan terhadap aspek-aspek tertentu dalam penegakan hukum

4. Relevansi pada Kasus Serupa:

Keputusan Mahkamah Agung dapat menjadi preseden penting untuk kasus serupa di masa depan (Hamdi, 2019). Analisis akan menyoroti bagaimana putusan ini dapat membentuk landasan hukum yang mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus serupa di kemudian hari.

5. Resonansi dalam Masyarakat dan Profesi Hukum:

Dampak keputusan ini juga dapat terasa dalam masyarakat dan profesi hukum. Reaksi masyarakat dan rekan-rekan profesi terhadap putusan tersebut dapat memberikan gambaran tentang signifikansinya dalam lingkup yang lebih luas.

6. Kontribusi terhadap Pengembangan Hukum:

Keputusan Mahkamah Agung dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum nasional (Agustine, 2018). Analisis akan mengeksplorasi apakah putusan ini melengkapi atau merubah arah perkembangan hukum yang ada.

Dengan menguraikan dampak keputusan pada interpretasi dan penerapan hukum di berbagai tingkatan, analisis ini memberikan wawasan yang mendalam tentang relevansi dan implikasi lebih luas yang dapat memengaruhi dinamika sistem hukum nasional (Al-Fatih, 2023). Hal ini membantu pemangku kepentingan, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan, untuk memahami konsekuensi praktis dan teoritis dari keputusan tersebut (Henny Nuraeny, 2022).

SIMPULAN

Dalam merinci argumen hukum, pertimbangan hakim, dan dampaknya terhadap sistem hukum nasional, analisis ini menyoroti implikasi penting yang dapat diambil dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst.

Pertama-tama, analisis argumen hukum mengungkapkan landasan dan kekuatan setiap posisi yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Pemahaman mendalam tentang argumen-argumen tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang konflik hukum yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya, eksplorasi terhadap pertimbangan hakim menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan akhir. Dengan memahami pertimbangan hakim, kita dapat melihat lebih jauh ke dalam proses penalaran hukum yang membentuk dasar keputusan, serta bagaimana faktor-faktor ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum nasional.

Dampak terhadap sistem hukum nasional, seperti dijelaskan dalam analisis, menyoroti transformasi dan perubahan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari putusan tersebut. Ini mencakup pergeseran dalam interpretasi hukum, perubahan dalam norma dan kaidah hukum, serta pengaruhnya terhadap praktik hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Kesimpulan ini memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum, memungkinkan mereka untuk merinci implikasi praktis dari putusan tersebut dalam praktek sehari-hari mereka. Selain itu, bagi peneliti, kesimpulan ini memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan hukum nasional dan peran Mahkamah Agung dalam membentuk arahnya. Untuk pembuat kebijakan, pemahaman dampak keputusan ini dapat membantu mereka dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan dinamika hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine, O. V. (2018). Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Pada Pemuliaan Tanaman Dan Alat Berat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *7*(1), 131–146.

Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Ummpress.

Anggreni, I. A. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2019). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, *2*(3), 227–236.

Bogdan, M. (2019). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Nusamedia.

Hamdi, M. F. (2019). Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *16*(3), 313–324.

Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.

Hiola, F. (2023). Analisis Aspek Hukum Pidana Dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Narkotika Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 133/Pid. Sus/2023/Pn Jkt. Sel. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *1*(3), 24–40.

Indratanto, S. P., & Nurainun, K. L. K. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Samudra*, *2020*.

Marrietta, D. M., & Adam, R. C. (2023). Implementasi Kewajiban Kurator Dalam Pembayaran Upah Pekerja Debitur Pailit: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt. Sus-Pailit/2021. *Unes Law Review*, *6*(2), 5780–5791.

Prasetyo, B., Ismail, R. R. A., Rasyid, F. A. N., & Asih, I. A. N. (2021). Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian. *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, *7*, 478.

Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.

Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No. 2/Pid. Sus/2014pn. Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *5*(1), 22–31.

Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Pt Citra Aditya Bakti.

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).